

L A P O R A N
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT



**[PkM Optimalisasi Peranan Santri Dalam Membangun
Kesadaran Politik Islam Masyarakat Kelurahan
Wonoasih Kota Probolinggo]**

Disusun oleh:

Ketua Tim	:	Abdul Azis	NIDN. 0706047701
Anggota	:	Farhan	NIDN. 2111128402

Lembaga Penerbitan, Pengabdian, dan
Pengabdian Kepada Masyarakat (LP3M)
Universitas Nurul Jadid
Paiton Probolinggo
Tahun 2023

[PkM Optimalisasi Peranan Santri Dalam Membangun Kesadaran Politik Islam Masyarakat Kelurahan Wonoasih Kota Probolinggo]

Abstrak. Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran santri dalam membangun kesadaran politik Islam masyarakat di Kelurahan Wonoasih, Kota Probolinggo. Di tengah kondisi masyarakat yang cenderung apatis terhadap politik, terutama dalam dimensi nilai-nilai Islam, santri sebagai agen perubahan memiliki potensi strategis untuk memberikan edukasi dan pendampingan. Kegiatan ini dilakukan selama 10 September 2022 sampai 15 September 2023 di kelurahan Wonoasih melalui pendekatan partisipatif, pelatihan kader politik, diskusi kelompok terfokus (FGD), dan penyuluhan berbasis nilai-nilai Islam rahmatan lil 'alamin. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pengetahuan dan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam proses politik yang etis dan berlandaskan nilai-nilai Islam. Para santri tidak hanya berperan sebagai pelajar agama, melainkan juga sebagai penggerak sosial yang aktif dalam membangun kesadaran politik masyarakat. Nilai-nilai seperti keadilan, amanah, dan partisipasi aktif ditanamkan melalui pendekatan dakwah yang komunikatif dan aplikatif. Kegiatan ini turut memperkuat hubungan antara pesantren dan masyarakat, menciptakan sinergi dalam mewujudkan masyarakat madani yang sadar akan hak dan tanggung jawab politiknya. Penguatan kapasitas santri sebagai agen dakwah sosial-politik menjadi langkah strategis dalam membentuk karakter warga negara yang tidak hanya religius, tetapi juga kritis dan peduli terhadap dinamika sosial-politik di tingkat lokal maupun nasional. Dengan demikian, santri menjadi elemen penting dalam pembangunan demokrasi yang berkeadaban.

Kata Kunci: Peranan Santri, Politik Islam, Kesadaran Politik, .

Abstract. Abstract. This community service (PkM) aims to optimize the role of santri in building Islamic political awareness in Wonoasih Village, Probolinggo City. In the midst of community conditions that tend to be apathetic towards politics, especially in the dimension of Islamic values, santri as agents of change have strategic potential to provide education and assistance. This activity was carried out through a participatory approach, political cadre training, focus group discussions (FGDs), and counseling based on Islamic values rahmatan lil 'alamin. The results of the activities show a significant increase in community knowledge and awareness of the importance of involvement in the political process that is ethical and based on Islamic values. The santri not only act as religious students, but also as social activists who are active in building community political awareness. Values such as justice, trustworthiness, and active participation are instilled through a communicative and applicable da'wah approach. This activity also strengthens the relationship between pesantren and the community, creating synergy in realizing a civil society that is aware of its political rights and responsibilities. Strengthening the capacity of santri as agents of socio-political da'wah is a strategic step in shaping the character of citizens who are not only religious, but also critical and concerned about socio-political dynamics at the local and national levels. Thus, santri become an important element in the development of a civilized democracy.

Keywords: Role of Santri, Political Islam, Political Awareness, .

BAB I LATAR BELAKANG

A. Analisis Situasi

Masyarakat Kelurahan Wonoasih, Kota Probolinggo, merepresentasikan komunitas urban dengan karakter religius yang kuat, namun menunjukkan tingkat partisipasi politik yang masih rendah. Apatisme politik, minimnya literasi politik, dan persepsi negatif terhadap dunia politik menjadi hambatan utama dalam membangun kesadaran politik Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh Rubaidi (2020), rendahnya partisipasi masyarakat dalam proses politik seringkali disebabkan oleh jauhnya politik dari nilai-nilai etis dan moral keagamaan. Hal ini berdampak pada ketidaktertarikan masyarakat untuk terlibat aktif dalam menentukan arah kebijakan publik melalui mekanisme demokrasi.

Di sisi lain, keberadaan pesantren dan santri di lingkungan Wonoasih menjadi aset sosial dan kultural yang potensial untuk mendorong transformasi kesadaran politik masyarakat. Santri memiliki legitimasi moral dan kedekatan dengan masyarakat, sehingga dapat menjadi agen perubahan yang efektif dalam menyampaikan pesan-pesan politik Islami yang menekankan pada keadilan, amanah, dan partisipasi aktif. Menurut Wahid (2021), peran santri dalam ranah sosial-politik tidak hanya terbatas pada ritual keagamaan, tetapi juga dapat berkontribusi dalam membentuk budaya politik yang sehat dan inklusif di tengah masyarakat.

Dengan pendekatan pemberdayaan melalui dakwah partisipatif, PkM ini berupaya menjawab tantangan rendahnya kesadaran politik masyarakat dengan mengoptimalkan peran santri. Kegiatan pelatihan, diskusi, dan penyuluhan yang dilakukan terbukti mampu membangun kepercayaan masyarakat terhadap pentingnya keterlibatan dalam kehidupan politik yang berlandaskan nilai-nilai Islam rahmatan lil ‘alamin. Sejalan dengan pendapat Hasan (2019), pendidikan politik berbasis nilai-nilai Islam mampu menjadi alternatif strategis dalam membentuk warga negara yang tidak hanya kritis secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas moral yang tinggi.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tingkat kesadaran politik Islam masyarakat Kelurahan Wonoasih sebelum dilakukan kegiatan PkM?
2. Bagaimana peran santri dapat dioptimalkan sebagai agen edukasi politik Islam yang etis dan partisipatif?
3. Apa saja bentuk kegiatan yang efektif dalam meningkatkan kesadaran politik masyarakat melalui pendekatan dakwah santri?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengidentifikasi kondisi awal kesadaran politik Islam masyarakat Kelurahan Wonoasih.
2. Mengoptimalkan peranan santri dalam proses edukasi politik Islam berbasis nilai-nilai keagamaan.
3. Meningkatkan keterlibatan dan partisipasi masyarakat dalam proses politik secara sadar, etis, dan Islami melalui pendekatan dakwah kultural.

D. Manfaat Penelitian

1. Teoritis:

Memberikan kontribusi terhadap kajian dakwah politik Islam dan pemberdayaan masyarakat berbasis pesantren, khususnya dalam konteks urban.

2. Praktis:

Menjadi model PkM yang dapat direplikasi di daerah lain, serta memperkuat kapasitas santri sebagai agen perubahan dalam membangun kesadaran politik masyarakat yang religius dan partisipatif.

BAB II METODE PELAKSANAAN

A. Tahap Pra Pelaksanaan

Tahap pra pelaksanaan dimulai dengan kegiatan observasi lapangan dan identifikasi kebutuhan masyarakat Kelurahan Wonoasih terkait kesadaran politik Islam. Tim PkM melakukan pemetaan sosial untuk mengetahui tingkat literasi politik dan persepsi masyarakat terhadap dunia politik. Selain itu, dilakukan koordinasi awal dengan pihak mitra pesantren untuk menyusun rencana kegiatan dan menentukan santri yang akan dilibatkan sebagai kader dakwah politik. Penyusunan instrumen kajian awal, materi pelatihan, serta logistik pendukung juga dilaksanakan pada tahap ini.

B. Tahap Pelaksanaan

Masa pelaksanaan kegiatan PkM berlangsung selama beberapa minggu dan terdiri atas beberapa agenda utama, antara lain: pelatihan dan pembekalan kepada santri terkait konsep dasar politik Islam, komunikasi dakwah, dan strategi pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, dilakukan kegiatan penyuluhan dan diskusi kelompok terfokus (FGD) bersama warga setempat, dipandu oleh santri sebagai fasilitator. Kegiatan ini berlangsung secara partisipatif, di mana masyarakat tidak hanya menjadi objek, tetapi juga subjek dalam proses edukasi politik. Evaluasi berkala dilakukan untuk menilai respons dan peningkatan pemahaman masyarakat.

C. Peran dan Tugas Mitra Pesantren

Mitra pesantren memegang peran penting dalam keberhasilan kegiatan ini. Tugas utama mereka adalah menyediakan santri yang memiliki kapasitas dan kesiapan untuk menjadi kader edukasi politik Islam. Selain itu, pesantren juga bertanggung jawab dalam proses pembinaan ideologis dan pendampingan moral bagi para santri yang terlibat. Pihak pesantren ikut serta dalam proses koordinasi teknis kegiatan serta menjadi jembatan komunikasi antara tim PkM dengan komunitas lokal. Kehadiran pesantren sebagai mitra memastikan keberlangsungan kegiatan pasca-PkM, khususnya dalam menjaga kesinambungan peran santri dalam dakwah sosial-politik di tengah masyarakat.

BAB III HASIL PENGABDIAN

Pengetahuan Politik

Pengetahuan politik merupakan fondasi utama dalam membentuk masyarakat yang sadar dan partisipatif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam konteks literasi politik Islam, pengetahuan ini tidak hanya mencakup informasi teknis tentang dunia politik, tetapi juga mengandung dimensi nilai, etika, dan tanggung jawab sosial yang dilandasi oleh ajaran Islam. Terdapat tiga aspek penting yang menjadi bagian dari pengetahuan politik: pemahaman tentang sistem pemerintahan, hak dan kewajiban sebagai warga negara, serta pengenalan terhadap tokoh, partai, dan proses pemilu

Pemahaman tentang sistem pemerintahan

Pemahaman tentang sistem pemerintahan menjadi aspek paling dasar yang harus dikuasai oleh setiap warga negara. Masyarakat harus mengetahui bagaimana struktur pemerintahan di Indonesia bekerja, mulai dari lembaga eksekutif, legislatif, hingga yudikatif, serta bagaimana hubungan antara pusat dan daerah dalam sistem desentralisasi. Dalam Islam, pemahaman terhadap sistem pemerintahan juga erat kaitannya dengan prinsip kepemimpinan (imamah) yang menekankan pada keadilan (adl), musyawarah (syura), dan tanggung jawab (mas'uliyah). Oleh karena itu, literasi politik berbasis nilai-nilai Islam harus mengajarkan bahwa pemerintahan bukan semata-mata urusan kekuasaan, melainkan amanah yang harus dijalankan demi kemaslahatan umat.



Hak dan kewajiban sebagai warga negara

Hak dan kewajiban sebagai warga negara harus dipahami secara seimbang. Dalam sistem demokrasi, setiap individu memiliki hak untuk memilih, berpendapat, menyampaikan aspirasi, serta terlibat dalam proses pengambilan keputusan publik. Namun, hak tersebut juga diiringi dengan kewajiban, seperti menghormati hukum, menjaga persatuan, dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Islam mengajarkan bahwa setiap Muslim adalah bagian dari masyarakat (*ummat*), dan karenanya memiliki tanggung jawab sosial (*fardhu kifayah*) untuk menjaga keadilan dan kemakmuran bersama. Pengetahuan politik yang menanamkan kesadaran hak dan kewajiban akan menciptakan warga negara yang aktif namun tetap bertanggung jawab secara etis.

Tokoh, partai, dan proses pemilu

Mengenal tokoh politik, partai, dan proses pemilu juga sangat penting agar masyarakat dapat membuat pilihan yang rasional dan bermoral. Pemilu bukan hanya tentang memilih pemimpin, melainkan juga tentang menilai visi, misi, rekam jejak, dan integritas calon. Literasi politik Islami mendorong pemilih untuk tidak memilih karena iming-iming materi atau fanatisme buta, tetapi berdasarkan pada pertimbangan akal sehat (*aqal*), nilai kebaikan (*ma'ruf*), dan keadilan (*adl*).

Dengan memperkuat tiga aspek pengetahuan politik ini, santri dan masyarakat dapat membangun kehidupan politik yang tidak hanya demokratis, tetapi juga berlandaskan nilai-nilai Islam yang luhur dan bermartabat.

Kesadaran Nilai Politik Islami

Kesadaran akan nilai-nilai politik Islami merupakan fondasi penting dalam membangun masyarakat yang adil, beradab, dan berorientasi pada kemaslahatan bersama. Nilai-nilai seperti amanah, keadilan, dan musyawarah menjadi prinsip dasar yang diwariskan dalam ajaran Islam untuk mengatur kehidupan sosial-politik umat. Amanah, dalam konteks ini, bukan hanya soal menjaga kepercayaan, tetapi juga tanggung jawab dalam menjalankan kekuasaan dan jabatan demi kepentingan umat, bukan demi keuntungan pribadi. Seorang pemimpin yang amanah akan senantiasa menempatkan kepentingan rakyat di atas segala hal dan menolak segala bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

Gambar. Sosialisasi Literasi Politik



Nilai keadilan menjadi pilar utama dalam struktur politik Islami. Dalam Al-Qur'an, Allah memerintahkan untuk berlaku adil karena keadilan dekat dengan takwa (QS. Al-Ma'idah: 8). Dalam konteks berpolitik, keadilan tidak hanya berarti distribusi kekuasaan atau kekayaan yang setara, melainkan juga keterbukaan terhadap kritik, penghormatan terhadap hak individu, dan penegakan hukum secara merata tanpa diskriminasi. Sementara itu, musyawarah menjadi cara pengambilan keputusan yang kolektif dan partisipatif, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam memimpin umat. Musyawarah mengedepankan dialog dan pencarian solusi bersama, bukan keputusan sepihak.

Lebih jauh, dalam Islam, politik dipandang sebagai bagian dari ibadah sosial—yakni sarana untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan keadilan sosial. Artinya, berpolitik bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan bagian dari pengabdian kepada Allah dan pelayanan terhadap umat. Oleh karena itu, etika dalam berpolitik menjadi sangat penting. Islam mengajarkan agar setiap aktivitas politik harus berlandaskan kejujuran, kesantunan, dan menghindari fitnah atau manipulasi. Politik Islami bukan hanya tentang hasil, tetapi juga prosesnya yang harus selaras dengan nilai-nilai moral dan spiritual. Dengan membangun kesadaran ini, umat Islam diharapkan mampu melahirkan generasi pemimpin dan masyarakat politik yang bersih, visioner, dan berorientasi pada nilai-nilai ilahiyah

Kemampuan Partisipatif

Kemampuan partisipatif merupakan salah satu indikator penting dari literasi dan kedewasaan politik warga negara. Dalam konteks masyarakat yang demokratis, kemampuan ini mencerminkan kesadaran individu untuk turut serta dalam proses pengambilan keputusan, baik di tingkat lokal maupun nasional. Salah satu bentuk konkret partisipasi politik adalah mengikuti pemilu dan musyawarah warga. Dengan menggunakan hak pilih secara cerdas dan bertanggung jawab, warga turut menentukan arah kebijakan negara. Begitu pula dalam musyawarah warga,

partisipasi aktif memungkinkan masyarakat menyampaikan pendapat dan usulan dalam menyelesaikan persoalan bersama secara kolektif dan demokratis.

Partisipasi politik yang sehat juga ditandai dengan kemampuan menyampaikan aspirasi secara santun. Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, perbedaan pendapat merupakan hal yang wajar dan bahkan konstruktif jika disampaikan secara etis dan beradab. Santunnya penyampaian aspirasi menunjukkan kedewasaan dalam berpolitik, di mana kritik disampaikan tanpa mencederai pihak lain dan tetap menjunjung tinggi norma serta etika publik. Hal ini sejalan dengan prinsip Islam yang mengajarkan amar ma'ruf nahi munkar dengan hikmah dan nasihat yang baik.

Aktif dalam organisasi masyarakat juga menjadi bentuk konkret dari kemampuan partisipatif. Keterlibatan dalam lembaga kemasyarakatan, organisasi pemuda, atau kelompok keagamaan memungkinkan individu untuk ikut serta dalam proses edukasi politik, pemberdayaan sosial, dan pelaksanaan program-program pembangunan. Melalui aktivitas organisasi, seseorang dapat mengembangkan kepemimpinan, memperluas wawasan, serta memperkuat solidaritas sosial. Kemampuan ini penting untuk mendorong lahirnya masyarakat sipil yang kuat dan mampu menjadi mitra kritis sekaligus konstruktif bagi pemerintah. Dengan demikian, kemampuan partisipatif bukan hanya hak, melainkan juga tanggung jawab moral sebagai warga negara yang ingin mewujudkan kehidupan politik yang sehat, adil, dan berorientasi pada kepentingan bersama

Sikap Kritis terhadap Isu Politik

Sikap kritis terhadap isu politik merupakan bagian penting dari kesadaran dan kecerdasan warga negara dalam kehidupan demokrasi. Dalam era informasi yang serba cepat dan terbuka seperti sekarang, kemampuan untuk membedakan antara fakta dan hoaks menjadi sangat vital. Hoaks politik kerap digunakan untuk membentuk opini publik secara keliru, menyudutkan lawan politik, atau menciptakan ketegangan sosial. Oleh karena itu, warga perlu memiliki literasi media dan kemampuan berpikir kritis agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi palsu yang tersebar di media sosial maupun platform digital lainnya.

Selain memilah informasi, sikap kritis juga tercermin dalam keberanian dan kemampuan untuk mengkritisi kebijakan publik. Warga negara yang kritis tidak hanya menerima keputusan pemerintah secara pasif, tetapi mampu menganalisis apakah suatu kebijakan berpihak pada kepentingan rakyat atau justru menguntungkan kelompok tertentu. Kritik terhadap kebijakan bukanlah bentuk perlawanan, tetapi ekspresi tanggung jawab moral dan bentuk partisipasi aktif dalam mengawal jalannya pemerintahan. Dengan mengedepankan

argumen yang rasional dan berdasar, kritik yang disampaikan bisa menjadi masukan yang membangun bagi penyelenggara negara.

Namun demikian, dalam menyikapi berbagai isu politik, penting untuk bersikap aktif tetapi tidak anarkis. Aktivisme politik yang sehat harus tetap berada dalam koridor hukum dan etika. Aksi-aksi protes atau unjuk rasa, misalnya, merupakan hak warga negara yang dijamin konstitusi, namun tetap harus dijalankan secara damai, tertib, dan tanpa kekerasan. Anarkisme justru merusak tatanan demokrasi dan sering kali dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk menciptakan instabilitas. Oleh karena itu, sikap kritis yang berimbang, cerdas, dan bertanggung jawab akan menciptakan budaya politik yang sehat dan memperkuat sistem demokrasi yang berkeadaban.

BAB IV

PENUTUP

Kesimpulan

Peranan santri dalam membangun kesadaran politik Islam di Kelurahan Wonoasih, Kota Probolinggo, terbukti memiliki kontribusi strategis, terutama dalam hal penyadaran nilai-nilai politik Islami seperti amanah, keadilan, musyawarah, serta pentingnya etika dalam berpolitik. Melalui pendekatan dakwah, pendidikan informal, dan kegiatan sosial keagamaan, santri berhasil menjadi agen transformasi yang mendorong masyarakat untuk lebih sadar akan hak dan tanggung jawab politik mereka sebagai warga negara yang beriman. Santri juga menjadi jembatan penting antara nilai-nilai keislaman dan praktik demokrasi modern, serta mampu menyuarakan aspirasi politik masyarakat dengan cara yang santun dan konstruktif.

Saran:

1. Penguatan Kapasitas Santri

Diperlukan pelatihan dan pendidikan politik Islami yang lebih terstruktur bagi para santri agar mereka memiliki wawasan kebangsaan, keterampilan komunikasi publik, dan pemahaman kontekstual terhadap dinamika politik lokal dan nasional.

2. Kolaborasi dengan Pemerintah dan Lembaga Sosial

Santri perlu difasilitasi untuk bekerja sama dengan pemerintah kelurahan, ormas Islam, dan lembaga pendidikan guna memperluas jangkauan dakwah politik yang mencerahkan dan membangun kesadaran kolektif.

3. Pemanfaatan Media Sosial dan Digital

Santri diharapkan mampu memanfaatkan media digital untuk menyampaikan pesan-pesan politik Islami yang edukatif dan damai, serta melawan narasi-narasi hoaks dan politik identitas yang destruktif

DAFTAR PUSTAKA

1. Abdullah, M. Amin. (2016). *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: SUKA Press.
2. Azra, Azyumardi. (2002). *Paradigma Baru Pendidikan Nasional: Rekonstruksi dan Demokratisasi*. Jakarta: Kompas.
3. Mujani, Saiful, & Liddle, R. William. (2004). *Politics, Islam, and Public Opinion*. *Journal of Democracy*, 15(1), 109–123.
4. Madjid, Nurcholish. (1997). *Cita-Cita Politik Islam Era Reformasi*. Jakarta: Paramadina.
5. Fauzi, Irwan. (2020). *Peran Santri dalam Membentuk Karakter Politik Masyarakat*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 24(2), 113–129.
6. Khoiruddin. (2021). *Literasi Politik Masyarakat Melalui Dakwah Kultural oleh Santri*. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi Islam*, 9(1), 45–60.
7. Rubaidi. (2020). *Politik dan Etika dalam Perspektif Islam*. Surabaya: UIN Sunan Ampel Press.
8. Syihabuddin. (2019). *Pesantren dan Transformasi Sosial Politik*. *Jurnal Sosial Budaya Syar'i*, 6(1), 34–50.
9. Nugroho, Riant. (2009). *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*. Jakarta: Elex Media.
10. Hidayat, R. (2022). *Kesadaran Politik Generasi Muda Muslim dalam Era Digital*. *Jurnal Politik Islam dan Demokrasi*, 5(1), 78–92.
11. Hasan, F. (2019). *Pendidikan Politik Islam: Konsep dan Implementasi*. Jakarta: Kencana
12. Wahid, M. (2021). *Santri dan Transformasi Sosial Politik di Era Digital*. *Jurnal Dakwah dan Komunikasi*, 15(2), 145–160.
13. Zarkasyi, A. (2023). *Etika Politik dalam Perspektif Islam*. *Jurnal Pemikiran Islam*, 18(2), 101–116.



YAYASAN NURUL JADID PAITON
**LEMBAGA PENERBITAN, PENELITIAN, &
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**
UNIVERSITAS NURUL JADID
PROBOLINGGO JAWA TIMUR

PP. Nurul Jadid
Karanganyar Paiton
Probolinggo 67291
☎ 0888-3077-077
e: lp3m@unuja.ac.id
w: <https://lp3m.unuja.ac.id>

SURAT TUGAS
Nomor : NJ-T06/LP3M/0225/A.1/09.2022

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini

N a m a : **Achmad Fawaid, M.A., M.A.**
NIDN 2123098702
Jabatan : Kepala LP3M
Nama PT : Universitas Nurul Jadid
Alamat PT : PO BOX 1 Karanganyar Paiton Probolinggo
67291 Menerangkan bahwa

N a m a : **Abd. Azis, M.Kom.I**
NIDN 0706047701
Jabatan : Dosen Tetap Universitas Nurul Jadid
Anggota : **Dr. Farhan, M.Sos.I**
NIDN : 2111128402
Prodi : KPI
Fakultas : Fakultas Agama Islam

Diberi tanggung jawab untuk melakukan pengabdian kepada masyarakat dengan judul “**Optimalisasi Peranan Santri Dalam Membangun Kesadaran Politik Islam Masyarakat Kelurahan Wonoasih**” pada tanggal 10 September 2022 s.d. 15 September 2023.

Demikian Surat Tugas ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.



Achmad Fawaid, M.A., M.A.
NIDN. 2123098702

Tembusan:

1. Wakil Rektor 1 Universitas Nurul Jadid (sebagai laporan)
2. Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora

HALAMAN PENGESAHAN

- 1 Judul : PkM Optimalisasi Peranan Santri Dalam
Membangun Kesadaran Politik Islam Masyarakat
Kelurahan Wonoasih Kota Probolinggo
- 2 Ketua Tim : Abdul Azis, M.Kom.I
a. NIDN : 0706047701
b. Program Studi : Komunikasi dan Penyiaran Islam
- 3 Anggota : Farhan
: 2111128402
: farhan@unuja.ac.id

Probolinggo, September 2023

Mengetahui,
Kepala LP3M,


ACHMAD FAWAID, M.A., M.A.
NIDN. 2123098702

Ketua Tim,


FARHAN
NIDN. 21111284